

## DAMPAK KEBIJAKAN TANAM PAKSA (1830) TERHADAP KEADAAN SOSIAL DAN PERDAGANGAN LADA DI LAMPUNG TAHUN 1830-1865

**Bahtiar Afwan<sup>1</sup>**

*bahtiarafwan@gmail.com<sup>1</sup>*

*Universitas Muhammadiyah Metro<sup>1</sup>*

**Abstrak :** Lampung adalah salah satu wilayah yang produksi ladanya dipertahankan karena lada hitam lampung termasuk komoditi yang terbaik. Petani lada diwajibkan untuk menjual produknya kepada pemerintah kolonial melalui kepala-kepala marga. Lada merupakan komoditi wajib untuk ditanam namun dalam skala yang kecil pada masa kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap dampak kebijakan tanam paksa di Lampung dan pengaruhnya bagi keadaan sosial serta perdagangan lada pada tahun 1830-1865. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian pada masa pemerintahan Belanda dan saat diterapkannya kebijakan tanam paksa menunjukkan adanya pergolakan dalam tatanan sosial serta ekonominya. Pada masa diterapkannya tanam paksa khususnya di tahun 1830-1865 banyak terjadi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung. Hal ini dilakukan karena kebijakan tersebut sangat merugikan pihak masyarakat Lampung. Tanam paksa komoditi lada pada masa itu juga mengalami penurunan dikarenakan terdapat komoditi baru yang ditetapkan seperti kopi, tembakau, dan nila yang saat itu sangat diminati pasaran dunia. Sehingga produksi lada dan penjualan lada kian lama semakin menurun.

**Kata Kunci:** Keadaan Sosial, Kebijakan, Lampung, Perdagangan Lada, Tanam Paksa

**Abstract:** Lampung is one of the areas where pepper production is maintained because Lampung black pepper is the best commodity. Pepper farmers were required to sell their products to the colonial government through clan heads. Pepper is a mandatory commodity to be planted but on a small scale during the forced cultivation policy implemented by the Dutch government. This article aims to reveal the impact of the forced cultivation policy in Lampung and its influence on social conditions and the pepper trade in 1830-1865. This study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Based on the results of research during the Dutch administration and when the forced cultivation policy was implemented, it showed that there were upheavals in the social and economic order. During the implementation of forced cultivation, especially in the years 1830-1865, there were many resistances carried out by the people of Lampung. This is done because the policy is very detrimental to the people of Lampung. The forced cultivation of pepper commodities at that time also experienced a decline because there were new commodities such as coffee, tobacco and indigo which were in great demand by the world market. So that pepper production and sales of pepper are increasingly decreasing.

**Keywords:** Social Condition, Policy, Lampung, Pepper Trade, Forced Cultivation,

### PENDAHULUAN

Lampung merupakan provinsi yang terletak di bagian ujung Pulau Sumatera. Wilayahnya sangat strategis dijadikan sebagai jalur perdagangan karena letak geografisnya yang sangat dekat dengan laut dan merupakan jalur penghubung antara kepulauan Jawa dan Sumatera. Sebagai wilayah yang dilalui sebagai jalur perdagangan, tentunya membuat provinsi Lampung

dilihat sangat berpotensi mengalami perkembangan dalam hal berniaga. Selain itu, Lampung sangat terkenal dengan berbagai kekayaan alam yang melimpah sebagai komoditi terbesar penghasil lada. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan catatan J.W.J Wellan wilayah Karesidenan Lampung ketika itu merupakan penghasil utama bagi komoditas lada, kemenyan, kopi, kayu hasil hutan, kopra dan rotan (Ariwibowo, 2018 : 432). Keadaan alam yang mendukung pertumbuhan perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik jika tanpa masyarakat yang terampil dalam mengelola perkebunan. Masyarakat Lampung sendiri merupakan orang-orang yang ulung dalam hal bercocok tanam. Tanaman yang sangat terkenal berasal dari wilayah Lampung salah satunya ialah lada. Karena hal itu pula lada dijadikan sebagai salah satu bagian dari simbol lambang daerah Lampung yang diresmikan pada tanggal 18 Maret 1964.

Lada dalam sejarah Provinsi Lampung memiliki cerita yang cukup panjang. Sebelum jatuh ketangan Pemerintah Hindia Belanda, komoditi lada telah mendapat perhatian besar dari beberapa penguasa sebelumnya seperti Kesultanan Banten dan VOC. Pada masa kekuasaan Banten, Kesultanan Banten telah melakukan kontrol yang kuat atas daerah-daerah penghasil lada seperti Lampung, Palembang, Bengkulu dan Jambi. Ketiga nama terakhir akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Banten, sementara wilayah Lampung tetap dipengaruhi dan memberi surplus pada Kesultanan Banten. Wilayah Lampung sendiri menjadi wilayah yang diperebutkan oleh Palembang dan Banten sebelum masuknya kekuasaan kolonial.

Persaingan itu yang mendorong Kesultanan Banten mengirimkan ekspidisi militer yang dipimpin oleh Maulana Muhammad untuk menaklukkan Palembang. Namun serangan tersebut mengalami kegagalan (Ekadjati, 1997 : 21). Setelah kedatangan VOC, perdagangan lada mulai dimonopoli dan setelah mengalami kebangkrutan akhirnya perdagangan lada diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kekuasaan Belanda di Lampung berpusat di Tulang Bawang. Pada masa tanam paksa (1830-1870) pemerintah mewajibkan petani lada menjual lada kepada pemerintah Belanda melalui kepala-kepala marga. Melalui kepala-kepala marga tersebut, pemerintah Hindia-Belanda mendapatkan lada, lada-lada tersebut akan dijual di pasaran internasional. Semasa kedudukannya, Belanda mengeluarkan beberapa kali kebijakan dalam kurun waktu tertentu, kebijakan yang dikeluarkan antara lain ialah kebijakan penyewaan tanah, tanam paksa, dan undang-undang Agraria. Berbagai kebijakan tersebut tidak lain diberlakukan Belanda sebagai cara dalam memperluas dan mempertahankan kekuasaan serta menambah pundi-pundi keuangan bagi pemerintah kolonial dari sektor perdagangan hasil pertanian.

Kajian mengenai keadaan sosial masyarakat Lampung dan perdagangan lada pada masa Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1830-1870 terlihat menarik untuk dilakukan. Tahun 1830 sendiri merupakan tahun terjadinya berbagai fenomena pemberontakan oleh masyarakat Lampung terhadap imperialis Belanda, dibalik peristiwa itu ditahun-tahun selanjutnya Lampung menjadi wilayah berkembangnya perdagangan lada dibawah kekuasaan Belanda, namun saat dikeluarkannya kebijakan Tanam Paksa atau lebih sering dikenal dengan sebutan *Cultur Stelsel* yang berusaha menghapus kekuasaan feodal, ternyata komoditi lada justru mengalami penurunan. Dalam bahasan kajian ini peneliti ingin melihat Dampak Kebijakan Tanam Paksa (1830-1870) Terhadap Keadaan Sosial dan Perdagangan Lada di Lampung Tahun 1830-1865. Menurut Kuntowijoyo (2003 : xviii) terdapat tiga cara pendekatan yang dapat digunakan Ilmu Sejarah untuk menghubungkan dirinya dengan masa kini yakni salah satunya dengan pendekatan historis. Melalui pendekatan ini dapat diketahui mengenai pola-pola penguasaan dan distribusi perdagangan lada pada masa Hindia-Belanda.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis yang meliputi heuristik, kritik intern dan ekstern, interpretasi dan historiografi. Pada tahap heuristik atau pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas yaitu mengenai perkebunan dan perdagangan lada. Tahap selanjutnya yaitu kritik intern dan ekstern, untuk melihat keaslian dan reabilitas sumber yang didapatkan. Kritik ekstern yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan melihat latar belakang dari penulis, kertas yang digunakan, *font* atau jenis huruf, bahasa, ejaan, dan penerbit dari buku tersebut. Kritik intern dilakukan dengan melihat isi dari buku itu, apakah isinya relevan dengan fakta sejarah dan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Tahap selanjutnya interpretasi, dilakukan berdasarkan fakta dan juga data yang diperoleh sehingga tidak hanya imajinasi semata untuk itu peneliti mencantumkan sumber data yang digunakan. Pada tahap interpretasi sumber-sumber primer yang telah didapatkan dibandingkan sumber-sumber lain baik sekunder ataupun tersier. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan pemaknaan. Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengkaitkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, sehingga di-peroleh sebuah gambaran peristiwa secara utuh dan kronologi serta saling berkaitan. Tahap terakhir historiografi yaitu penulisan sejarah. Penulisan sejarah disusun secara kronologis dan memperhatikan aspek kausalitas. Pembahasan mengenai dampak perkebunan dan perdagangan di Lampung akan disampaikan secara kronologis pada masa Belanda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Keadaan Sosial Masyarakat Lampung dan Perdagangan Lada Sebelum Masa Kebijakan Tanam Paksa.***

Sebelum masa kekuasaan Belanda, Lampung pernah dikuasai dua penguasa wilayah yang cukup kuat yakni Kesultanan Banten dan kongsi dagang dari Belanda VOC. Sebelum kedudukan Belanda di Lampung, wilayah Lampung memiliki lahan yang luas dan subur, pada abad ke-16 wilayah Lampung masih sangat minim penduduk, sehingga banyak lahan pertanian yang tidak terkelola secara maksimal. Masyarakat mengembangkan sistem kebun, salah satunya ialah perkebunan dan perdagangan lada. Sejak abad ke-16 juga masyarakat Lampung telah mengenal tanaman lada. Banten sendiri berupaya untuk menanam lada di wilayahnya, namun kendala pertama yang dihadapi ialah luas wilayah yang bisa ditanami ( Gulliot, 2008 : 202). Banten memperluas wilayah kekuasaannya. Wilayah Lampung yang dekat dengan Banten, memudahkan Banten mengontrol wilayah tersebut. Masyarakat Lampung tidak melakukan perlawanan terhadap kesultanan Banten, pemuka-pemuka di Lampung sendiri diberi mandat untuk menjadi penguasa di Lampung atas restu Sultan Banten (Gonggong dkk, 1983 : 21).

Pada saat berada dibawah kekuasaan Banten, Lampung menjadi wilayah penghasil lada terbesar di Sumatera. Pada masa Kesultanan Banten rakyat diwajibkan menanam 500 pohon lada. Penanaman lada dilakukan dalam lingkup keluarga. Lada sendiri banyak ditanam dan dikembangkan oleh masyarakat pepadun (Masroh, 2015 : 67). Hasil dari perkebunan lada selanjutnya akan dijual kepada *Jenang*, yang kemudain dari *jenang* akan dijual kepada Kesultanan Banten. Pada masa Kesultanan Banten, lada merupakan komoditi unggulan yang diperjual-belikan.

Lampung yang mulanya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Banten akhirnya harus direlakan untuk diambil alih kekuasaannya oleh pemerintah VOC, setelah masa kekuasaan VOC berakhir, kekuasaan terhadap wilayah Lampung beralih kepada Pemerintah

Belanda akibat banyaknya terjadi penyelewengan yang dilakukan pejabat-pejabat VOC. Semenjak itu wilayah Lampung berada di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Jalan yang ditempuh oleh Pemerintah Belanda untuk menarik simpati masyarakat Lampung dapat diakui menggunakan siasat yang sangat cerdas, yakni dengan mendekati pembesar-pembesar wilayah. Salah satu pembesar wilayah Lampung pada masa itu ialah Radin Inten I. Belanda mengambil siasat dengan mengakui kepemimpinan Radin Inten I dan diakui pangkatnya sebagai ratu (*Prins Regent*) dan Kurnel di Negara Ratu Kalianda. Namun setelah terjadinya alih kekuasaan pada pihak Belanda pada tahun 1816, Kekuasaan Radin Inten I tak lagi diakui (Rijal, 2011 : 40). Radin Inten I satu melakukan penentangan salah satunya dengan melakukan perdagangan bebas, dimana hasil komoditi lada yang dihasilkan oleh para petani lada di Lampung dijual kepada Inggris lebih tinggi daripada ketetapan Sultan Banten (Ota, 2005 : 9).

### ***Pemberlakuan Kebijakan Tanam Paksa 1830-1870.***

Pada saat masyarakat Lampung melakukan berbagai upaya perlawanan yang dimulai sejak tahun 1815 dan dipimpin oleh Radin Inten I, ditengah-tengah peristiwa itu pula Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan baru sebagai pengganti kebijakan sistem sewa tanah yang mengalami kegagalan. Kebijakan tersebut ialah kebijakan Tanam Paksa atau *Culture Stelsel*. Pemerintah kolonial tidak hanya merusak sitem simbolik dari kekuasaan, tetapi juga merubah landasan tradisional ekonomi agraris dengan membuat suatu sistem yang disebut dengan Tanam Paksa (Lombard, 2008 : 52). Latar Belakang dikeluarkannya kebijakan Tanam Paksa sendiri dikarenakan pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan di negeri Belanda sendiri maupun peperangan yang terjadi di Hindia-Belanda. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat memberi keuntungan bagi pihak Belanda. Hingga akhirnya munculah ide Tanam Paksa.

Tanam Paksa adalah sebuah kebijakan yang diberlakukan oleh Gubernur Jendral Van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan para petani di Hindia-Belanda untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat di ekspor ke pasaran dunia. Jenis tanaman yang wajib berupa tanaman perkebunan seperti, tebu, kopi, tembakau dan nila/indigo yang sangat laku di pasaran internasional (Nana Supriyatna, 2014: 86). Ciri utama dari sistem tanam paksa ialah mewajibkan rakyat menanam tanaman yang telah ditentukan serta membayar pajak dalam bentuk barang dengan hasil-hasil pertanian yang mereka tanam. Tanam Paksa sendiri pertama diterapkan di wilayah Pulau Jawa, namun terdapat wilayah lain yang menjadi daerah sasaran diterapkannya sistem tanam paksa yakni Sumatera Barat, Minahasa, Lampung dan Palembang.

Ketentuan-ketentuan dalam tanam paksa itu dimuat dalam *Staatbald* (lembaran Negara) Tahun 1834 No.22. Dengan ketentuan-ketentua diantaranya ialah :

- 1) Berdasarkan persetujuan, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia.
- 2) Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tanam paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
- 3) Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan atau tanaman ekspor (jenis tanaman untuk tanam paksa) tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
- 4) Hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda
- 5) Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh petani, menjadi tanggung jawab pemerintah.

- 6) Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa dibawah langsung pemerintahan penguasa pribumi, sedang pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.

Pemberlakuan tanam paksa ini rupanya sangat memberatkan rakyat pribumi, termasuk wilayah Lampung yang menerapkan sistem tanam paksa akhirnya mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Berbagai perlawanan rakyat terus dilakukan hingga Benteng Raja Gepeh jatuh ketangan Belanda pada 24 Oktober 1834, sehingga Radin Imba II dan pasukannya yang setia berhasil melarikan diri ke Lingga ( Kielstra, 1919 : 257). Perlawanan dari masyarakat terus gencar di lakukan meskipun harus bergriya kesana-kemari. Hal tersebut terjadi demikian karena petani dikenakan pajak bersama, hasil kelebihan panen yang diserahkan kepada Belanda tidak dikembalikan kepada rakyat, hal tersebut terjadi karena kurangnya kepegawaian dari pemerintah atau bupati dan kepala desa yang menaksir hasil tanaman tersebut jauh dari target tanam paksa, padahal menurut taksiran umum harusnya lebih. Dalam hal ini yang mendapatkan keuntungan ialah para pegawai pemerintah bukan petani (Sugiharsono, 2008 : 56). Sistem Tanam Paksa ini merupakan kebijakan yang sangat merugikan para petani, disamping harus membayar pajak berupa hasil tani, lahan pertanian mereka harus ditanami tanaman yan telah ditentukan.

#### ***Dampak Kebijakan Tanam Paksa (1830-1870) Terhadap Keadaan Sosial dan Perdagangan Lada di Lampung Tahun 1830-1865.***

Sebelum diambil alih kekuasaannya oleh pemerintah Belanda, pada masa Kesultanan Banten dan VOC, komoditi lada di Lampung merupakan sektor pertanian yang sangat diunggulkan. Bahkan, perkebunan dan perdagangan lada di Lampung menjadi wilayah yang diperebutkan oleh para penguasa. Namun sejak setelah kalahnya Radin Inten II dalam upaya menaklukan Belanda, wilayah Lampung akhirnya dapat dikuasai hampir secara keseluruhan. Pada masa kedudukan Belanda tersebut, pemerintah Belanda semakin antusias dalam memonopoli perekonomian salah satunya yakni melalui perdagangan lada, namun lada tak lagi begitu diunggulkan, meskipun Lampung sendiri merupakan wilayah penghasil lada hitam terbesar di Sumatera. Untuk kawasan Asia dan Australia pasar lada ada di Kobe Jepang, Melbourne dan Sidney. Lada dikumpulkan ke Batavia terlebih dahulu sebelum dijual ke berbagai negara tersebut.

Kegagalan pada masa pemberlakuan kebijakan sistem sewa tanah (*landdelijk stelsel*) tidak membuat Pemerintah Belanda kehabisan akal (Lelatul. Kebijakan yang sebelumnya berusaha menghilangkan kefeodalan dan menjunjung aspek kebebasan ternyata tak sesuai harapan. Akhirnya diberlakukan kebijakan baru yakni Tanam Paksa. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda akhirnya mengeluarkan kebijakan tanam paksa dan wilayah Lampung sendiri merupakan salah satu wilayah yang menerapkan kebijakan tanam paksa tersebut. Pada tahun 1830 tersebut, pemerintah Belanda menjadikan lada sebagai tanaman yang wajib di tanam namun hanya untuk skala kecil (Immadudin, 2016 : 69) tak lagi seperti masa sebelum kedudukan Belanda, lada merupakan komoditi yang sangat diunggulkan sebagai hasil pertanian yang dijual ke berbagai negara. Pada masa Tanam Paksa, komoditi pertanian seperti kopi, tebu dan indigo mulai diperkenalkan. Ketika tanam paksa mulai diberlakukan, lada tidak lagi menjadi komoditas yang diutamakan (Immadudin, 2016 : 69).

Dalam sistem Tanam Paksa, petani wajib menyerahkan hasil panen lada kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk dari pembayaran pajak. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa ini melibatkan struktur yang ada dimasyarakat Lampung. Dalam hal ini *jenang* bertugas

mengumpulkan hasil produksi tani, sebagai imbalannya pemerintah Belanda memberikan gaji (Masroh, 2015 : 70). Saat kebijakan Tanam Paksa mulai diberlakukan, Pemerintah Belanda mewajibkan daerah-daerah yang wialayah tanahnya subur untuk ditanami berbagai komoditi baru seperti teh, tebu, nila, kopi, tembakau (Abihasam dkk, 2011 : 41). Seperti dikutip dari kaskus.co.id pada masa Tanam Paksa bebrapa wilayah yang mendapatkan aturan untuk menanam jenis komoditi perkebunan ialah, Jawa : Tebu, Indigo, Kopi, Tembakau, Sumatera Barat : Kopi, Lampung : Lada, Sulawesi : Kopra.

**Tabel 1** luas tanah dan jenis tanaman utama yang ditetapkan untuk ditanam pada masa tanam paksa tahun 1833.

<b>Jenis Tanaman</b>	<b>Luas Tanah (Dalam Bahu)</b>
Tebu	32, 722
Nila	22,141
Teh	324
Tembakau	286
Kayu Manis	30
Kapas	5

(Sumber : Boeke, JH : 1983. Perkapitalisme di Asia)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penanaman lada bukan merupakan komoditi yang paling utama lagi saat Pemerintah Belanda memberlakukan Kebijakan Tanam Paksa. Pemerintah kolonial Belanda mulai mewajibkan para petani untuk menanam berbagai komoditi baru yang mulai diminati pasaran Eropa guna mendapatkan keuntungan untuk kas negara Belanda. Dalam sistem tanam paksa ini hasil dari pertanian lada tetap diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pada masa tanam paksa, komoditi yang sangat diminati ialah kopi, tembakau, dan nila. Oleh sebab itu produksi dan permintaan terhadap sektor lada semakin berkurang. Perkembangan jenis tanaman dari berbagai komoditi lain yang memiliki nilai jual di pasaran Eropa yang lebih menjanjikan akhirnya membuat perdagangan lada semakin menurun. Pada abad ke 19, komoditi lain seperti lada dan timah mengungguli lada dalam ekonomi dunia, akibat dari penetapan ketentuan jenis tanaman yang harus ditanam itu pula membuat para petani lada memilih kabur karena tak tahan dengan biaya pajak yang dikenakan serta lahan mereka yang harus dibagi untuk ditanami tanaman yang telah ditetapkan pemerintah kolonial, sedangkan mereka harus tetap membayar pajak dan hasil panen sering kali tak diberikan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Menurunnya produksi dan permintaan lada semakin menambah beban masyarakat Lampung dalam memperoleh kehidupan ekonomi yang cukup. Dalam buku 20 Tahun Indonesia Merdeka (1996 : 230) dikatakan bahwa jumlah perkebunan lada makin sedikit jika dibandingkan jumlah perkebunaan lainnya. Semakin sedikitnya jumlah perkebunan yang ada tentu akan berpengaruh terhadap hasil produksi lada. Semakin berkurangnya hasil lada tentu akan mempengaruhi jumlah perdagangan lada di kancan internasional. Ditambah lagi pemerintah.

Disamping banyaknya perlawanan yang terjadi, sistem tanam paksa terus berlanjut. Dengan kewajiban yang diembankan keada rakyat untuk menanam lahan mereka dengan jenis tanaman yang telah ditetapkan serta kewajiban membayar pajak berupa hasl bumi kepada Pemerintah Belanda, kehidupan rakyat Lampung pada saat itu sangat jauh dari kelayakan standar ekonomi.

## KESIMPULAN

Kondisi sosial dan perdagangan lada di Lampung pada masa pemerintahan Belanda dan saat diterapkannya kebijakan Tanam Paksa menunjukkan adanya pergolakan dalam tatanan sosial serta ekonominya. Pada masa diterapkannya tanam paksa, banyak terjadi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung sendiri dalam upaya menghentikan penjajahan Belanda. Kebijakan Tanam Paksa tersebut menetapkan bahwa lahan dari warga wajib ditanami tanaman yang telah di tentukan, dan wilayah Lampung dijadikan sebagai wilayah yang ditanami lada, namun hanya untuk sekala kecil. Kebijakan Tanam Paksa ini juga menetapkan pajak bagi para petani sehingga sangat membebankan rakyat, pajak yang dimaksud disini ialah hasil bumi yang ditanam. Pada masa Tanam Paksa komoditi lada mengalami penurunan dikarenakan terdapat komoditi baru yang ditetapkan seperti kopi, tembakau, dan nila yang saat itu sangat diminati pasaran dunia. Sehingga produkis lada dan penjualan lada kian lama semakin menurun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abihasam, Hasriyadi. Miranda (2011) *Membunuh Indonesia “Konspirasi Global Penghancuran Kretek”*. Jakarta : Kata-Kata Press
- Ariwibowo, Gregorius Andika (2018) *Aktivitas Ekonomi dan Pedagangan di Kresidenan Lampung Pada Periode 1856-1930*. Jurnal Penelitian Vol. 10 No 2 Juni. hlm 431-446.
- Boeke, J.H (1983) *Perkapitalisme di Asia*. Jakarta : Suara Harapan
- Ekadjati, Edi (1997) Kesultanan Banten dan Hubungannya dengan Wilayah Luar”, dalam *Sri Sutjaningasih (ed) Banten Kota Pelabuhan Jalur Sutera : Kumpulan Makalah Diksumsi*. Jakarta : Direktorat Jendral Kebudayaan Depdikbud.
- Gonggong, A. Soenjata K & Muchtarudin Ibrahim (1983) *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Lampung*. Lampung : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gulliot, C (2008) *Banten : Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. Jakarta : KPG.
- Immadudin, Iim (2008) “*Hubungan Lampung-Banten dalam Perspektif Sejarah*”, dalam Jurnal Penelitian Vol. 40 No 3. Desember, hlm 1490.
- \_\_\_\_\_ (2016) *Perdagangan Lada dan Perebutan Pengaruh di Lampung 1653-1856*” Makalah dalam Seminar Hasil Penelitian, BPNB se-Indonesia, Makassar, 25 s.d. 28 April 2016.
- Kartodirjo, Sartono (1984) *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Kielstra, EB.1919. “*De Lampongs*” *Onze Eeuw jaargang*. 15 : 1919.
- Kuntowijoyo (2003) *Metodologi Sejarah edisi Kedua*. Yogyakarta : Yogyakarta
- Lombard, Danys (2008) *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Masroh, Laelatul. (2015) “*Perkebunan dan Perdagangan Lada di Lampung Tahun 1816-1942*”, *Sejarah Dan Budaya, Tahun Kesembilan, Nomor 1, Juni*
- Ota, Atatushi (2005) “*From ‘Piracy’ to Inter-Regional Trade*. *IIAS Newsletter*, March. 2005.
- Rijal, Andi Syamsu (2011) *Dua Pelabuhan Satu Selat : Sejarah Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni di Selat Sunda 1912-2009*. Tesis. Depok : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Sejarah Universitas Indonesia
- Sugiharsono (2008) *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta : Gramedia
- Supriyatna, N (2014) *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta : Grafindo Media Pratama